

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan Pustaka didasarkan pada penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran tentang konsep dasar dari variabel yang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga penulis membahas mengenai kerangka pemikiran yang berhubungan dengan hubungan variabel bebas dan terikat. Kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan.

##### **2.1.1 Pengangguran**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pengangguran**

Pengangguran dapat diartikan sebagai orang yang menganggur yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan selama empat minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu pekerjaan baru dalam waktu empat minggu (Sandy Dharmakusuma, 1998). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka adalah angka yang menunjukkan besarnya pengangguran termasuk dalam kategori angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka sering digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran disuatu wilayah tertentu serta persentase dari total angkatan kerja yang menganggur.

$$\text{Tingkat pengangguran terbuka} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Jika jumlah penduduk bertambah pesat, itu berarti jumlah pekerja meningkat pesat, sementara tidak ada lowongan yang muncul, sehingga terjadi pengangguran. Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa kebebasan tenaga kerja dikatakan terjadi pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan angkatan kerja, dimana jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lowongan kerja.

### **2.1.1.2 Teori Pengangguran**

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran:

#### a) Teori Klasik

Teori klasik ini menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas untuk memastikan terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Jadi dalam teori klasik ini jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan turun.

#### b) Teori Keynes

Menurut teori Keynes masalah pengangguran terjadi karena permintaan agregat rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akibatnya produsen rugi dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis pengangguran

Menurut Sukirno (1994) dalam (Metekohy Stellamaris, 2014) pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi empat yaitu:

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional.

b. Pengangguran Siklikal

Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran Stuktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, beberapa bagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini disebabkan oleh salah satu dari faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang

wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran ini disebabkan karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 1994):

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta karena jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terjadi karena perubahan musim terutama di sektor pertanian dan perikanan. Misalnya pada saat musim hujan para pekerja penyadap karet tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga mereka tetap menganggur.

d. Setengah Menganggur

Pekerja yang hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu atau satu hingga empat jam sehari.

#### **2.1.1.4 Faktor Penyebab Pengangguran**

Menurut Riska (2016,89) terjadinya pengangguran disebabkan karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

##### **1. Lapangan Pekerjaan**

Ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan tenaga kerja. Sehingga banyak orang yang menganggur diakibatkan kurangnya lowongan pekerjaan. Dan ini juga menyebabkan tidak meratanya lapangan pekerjaan antara kota dan pedesaan.

##### **2. Keahlian dan Keterampilan**

Kurangnya keahlian dan keterampilan menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Apabila seseorang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan maka akan sulit untuk mencari pekerjaan karena kurangnya pemahaman dalam bidang pekerjaan yang sedang dijalani tersebut.

#### **2.1.1.5 Dampak Pengangguran**

Pengangguran berdampak pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Menurut Riska Franita (2016:89) dalam Humaira, Malia, (2021) dampak dari pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, jumlah tuna wisma, dan pengamen jalanan. Dimana orang yang menganggur dengan pendapatan rendah, sehingga akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Pengangguran akan meningkatkan kejahatan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan menyebabkan masyarakat melakukan tindakan kejahatan seperti,

pencurian, peredaran narkoba, dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Pengangguran juga menimbulkan tekanan psikologis pada seseorang karena kehilangan pekerjaan merupakan penurunan taraf hidup.

#### **2.1.1.6 Cara Mengatasi Pengangguran**

Untuk mengatasi pengangguran bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan cara ini tenaga kerja dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri.

- b. Menciptakan lapangan pekerjaan yang baru

Dengan menciptakan lapangan kerja yang baru dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan pemerintah juga dapat memberikan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia agar mengurangi tingkat pengangguran.

- c. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha yang berskala kecil atau menengah yang dimiliki dan dikelola masyarakat. Dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menjadi wirausahawan.

## 2.1.2 Jumlah Penduduk

### 2.1.2.1 Pengertian Penduduk

Penduduk didefinisikan sebagai mereka yang telah tinggal di suatu daerah atau wilayah sekurang-kurangnya enam bulan atau berniat untuk menetap di daerah tersebut Silastri, (2017) dalam (Widiastuty, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penduduk merupakan warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia, baik itu warga negara Indonesia maupun orang asing. Dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya proses kelahiran, kematian, dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain. Jumlah tersebut dapat dihitung dari berbagai sumber data kependudukan, sumber utama data penduduk adalah sebagai berikut A. Ritonga (2001) dalam (Henriansa, n.d.):

#### a. Sensus Penduduk (SP)

Sensus penduduk adalah proses pengumpulan, pengolahan, pengambilan, analisis dan penyajian data kependudukan mengenai kependudukan, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Sensus ini mencakup seluruh wilayah geografis negara dan seluruh penduduknya. Perhitungannya terdiri dari dua Langkah, yang pertama dilakukan secara *de jure* (menyebarkan responden

menurut tempat tinggal). Kedua, dilakukan pada hitungan (menyebarkan responden berdasarkan lokasi yang ditemui agen pada sensus).

b. Registrasi Penduduk

Registrasi penduduk merupakan sistem pencatatan kelahiran yang diselenggarakan 1960 oleh pemerintah kota. Mereka yang mengaku penduduk wilayah tersebut terdaftar sebagai penduduk sistem kependudukan. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c. Survei Penduduk

Survei penduduk dilakukan sebagai sampel atau studi kasus untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh. Survei penduduk memiliki periode tertentu yang harus dilewati setiap sepuluh tahun atau setiap empat tahun, enam bulan atau tiga bulan. Beberapa penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu survei penduduk antar sensus (Supas), survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI), dan survei ketenagakerjaan nasional (Sakernas).

### **2.1.2.2 Teori Penduduk**

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penduduk diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Thomas Robert Malthus

Menurut Malthus, penduduk mampu bertambah menurut deret ukur (2, 4, 16, 32, ....), sedangkan bahan pangan hanya mampu bertambah secara deret hitung (2, 3, 4, 5, 6, ....). Selain itu, kemampuan tumbuh penduduk akan

terhambat jika kekurangan bahan pangan. Teori Malthus menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus juga sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam yang tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak.

### **2.1.2.3 Komponen-Komponen Penduduk**

#### **a. Fertilitas**

Fertilitas merupakan keluarnya seorang anak dari rahim wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Misalnya berteriak, bernafas, dan sebagainya (Fikrrotul Hasanah, et.al)

#### **b. Mortalitas**

Mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang mempengaruhi struktur penduduk dua komponen lainnya yaitu angka kelahiran dan mobilitas penduduk (Arif et.al, 2015).

#### **c. Migrasi**

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan melintasi batas negara atau batas administrasi dengan tujuan menetap.

## **2.1.3 Pembangunan Manusia**

### **2.1.3.1 Pengertian Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya puluhan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap waktu. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang mendasar yaitu untuk berumur panjang dan sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak (BPS,2015:8). Menurut Saputra (2011) dalam (Mahroji & Nurkhasanah, 2019) indeks pembangunan manusia merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. Menurut teori pertumbuhan baru ditekankan pada pentingnya keterlibatan atau peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan modal manusia dan peningkatan serta pengembangan produktivitas manusia. Dalam pandangan Adam Smith dijelaskan bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga berpendapat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi yang akan membuat perekonomian semakin naik Mulyadi, (2017:4) dalam (Arizal & Marwan, 2019).

Indeks pembangunan manusia (IPM) umumnya sering digunakan untuk mengklarifikasikan suatu negara sebagai maju, berkembang atau terbelakang dan

juga untuk mengukur kebijakan ekonomi dalam hal kualitas hidup. Menurut Amartya Sen, “kelaparan bukan disebabkan oleh kekurangan makanan, tetapi oleh distribusi makanan yang tidak merata, karena sistem sosial yang tidak adil”. Penyebab kelaparan terutama karena faktor ekonomi dan sosial, seperti turunnya upah, pengangguran, naiknya harga pangan dan lemahnya mekanisme distribusi. Windhu Putra, (2021) dalam (Nugroho & Marseto, 2017).

### **2.1.3.2 Teori Pembangunan Manusia (*Human Capital Theory*)**

Secara bahasa *human capital* terdiri dari dua dasar yaitu manusia dan kapital (modal). Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam *human capital* merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Dan manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi.

Konsep *human capital* terdiri dari tiga konsep. Konsep yang pertama adalah *human capital* sebagai aspek individu. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas Rastogi (2002) dalam (Ritonga, 2019) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki manusia. Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan suatu

yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu Alan et al, (2008) dalam (Ritonga, 2019). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1999) dalam (Ritonga, 2019) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya Rosen, (1999) dalam (Ritonga, 2019). Frank dan Bemanke (2007) (Ritonga, 2019) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia.

### **2.1.3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

#### **a. Usia Hidup**

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir yang dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini dilakukan dengan dua jenis data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup per wanita usia lima belas tahun sampai empat puluh sembilan tahun menurut kelompok umur lima tahunan.

#### **b. Pengetahuan**

Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia lima belas tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek

huruf adalah persentase penduduk usia lima belas tahun ke atas yang sudah bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

c. Standar Hidup Layak

Angka standar hidup layak dapat menggunakan indikator GDP (*Gross Domestik Product*) perkapita riil yang telah disesuaikan atau menggunakan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan.

### 2.1.3.4 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan terdapat tiga indikator penyusunan yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$$

2. Pencapaian pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (AHLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

3. Indeks Hidup Layak diukur dari tingkat pengeluaran

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Menghitung indeks pembangunan manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Keterangan:

1. Apabila nilai indeks pembangunan manusia kurang dari 50 maka indeks pembangunan manusia rendah.
2. Apabila nilai indeks pembangunan manusia antara 50 sampai 80 ( $50 < IPM < 80$ ) termasuk kategori sedang.
3. Apabila nilai indeks pembangunan manusia di atas 80 maka menunjukkan indeks pembangunan manusia tinggi.

Setiap komponen indeks manusia merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dengan nilai minimalnya dan selisih nilai maksimal dengan nilai minimal indikator tersebut.

$$IPM = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\max} - X_{(i)\min}} \times 100$$

Dimana:

$X_{(i)}$  : indikator ke -i (i=1,2,3)

$X_{(i)\max}$  : nilai maksimum  $X_{(i)}$

$X_{(i)}$  : nilai minimum  $X_{(i)}$

## **2.1.4 Belanja Publik**

### **2.1.4.1 Pengertian Belanja Publik**

Belanja publik adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor publik untuk membeli barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat atau membiayai proyek-proyek publik. Belanja publik ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial dan layanan publik lainnya. Belanja publik juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut Mangkoesoebroto, (1994) dalam (Sendow et al., 2019).

#### **2.1.4.2 Teori Belanja Publik**

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah bisa melalui kebijakannya dengan melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa pemerintah.

##### **1. Teori Makro Belanja Publik**

Teori belanja publik menurut Supermoko (1992) belanja publik dapat bersifat menyeluruh yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat juga untuk menghasilkan barang lainnya.

Disamping itu, belanja publik dapat berupa transfer fiskal, terutama dalam bentuk transfer kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara sebagai hadiah. Keynes (dalam Kusnaedi, 2001) menyatakan bahwa teorinya menghubungkan semua tingkat peluang kerja yang mungkin yang terjadi (pekerjaan penuh dan setengah pengangguran). Dan masalah ekonomi seperti pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan efektif atau permintaan agregat. Keynes (dalam Sukirno, 2004) menyatakan bahwa: "pengeluaran agregat yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Dan Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan memerlukan usaha serta kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh." Peranan belanja publik dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan kemakmuran, dalam mendorong intensif dan usaha swasta, dan dalam menciptakan keseimbangan regional dalam perekonomian.

Hukum Wagner yang dijelaskan oleh Mangkoesoebroto menyatakan bahwa suatu teori mengenai perkembangan belanja publik yang semakin besar sebagai persentase terhadap *Gross National Product* (GNP), teori ini juga berdasarkan pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19, hukum tersebut berbunyi: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka pengeluaran pemerintah juga akan

meningkat. Hukum Wagner juga memiliki kelemahan karena tidak didasarkan pada teori tentang barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya pada teori yang dikenal sebagai teori organis mengenai pemerintah, yang memandang pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

## 2. Teori Mikro Belanja Publik

Menurut Mangkoesobroto (2002) dalam (Carolina, 2022), teori mikro belanja publik lebih bersifat analisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Dan ini akan menimbulkan interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik untuk menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Dalam Mangkoesobroto (1994) menjelaskan faktor-faktor perkembangan belanja publik yaitu:

1. Perubahan kualitas barang publik
2. Perubahan permintaan barang publik
3. Perubahan harga faktor produksi
4. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dalam gabungan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut “Pengangguran”. Melakukan penelitian harus ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, maka pada bagian

ini akan diberikan penjelasan beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. (Lina Marliana, 2022)	Independen: -IPM Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Upah Minimum	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Journal of economics and Business, ISSN 2597-8829 (online)
2.	Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat (Reni Helvira dan Endah Putri Rizki 2020).	Independen: -IPM Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel Independen: -Investasi -Upah Minimum	Secara simultan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan sedangkan secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	E-Journal Vo1.1. No.1 (2020) 55-62 ISSN 2745-5874 ISSN 2745-4762 (online).
3.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan	Independen: -IPM Dependen:	Variabel Independen: -Tingkat Kemiskinan	Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat	1.1,SSN:2810-0581(online) ULIL ALBAB:Jurnal Ilmiah Multidisplin Vol

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	n Manusia dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun (Aditya Dwi Nugroho dan Marseto 2021).	-Tingkat Pengangguran Terbuka		pengangguran terbuka.	1.1, No Januari 2022.
4.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh (Riska Garnella, et al 2018).	Independen: -Indeks Pembangunan Manusia Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel independent: -Pertumbuhan Ekonomi -Kemiskinan	Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal JIMEBIS- Volume1 Nomor1 Januari-Juni 2020.
5.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur (M. Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R 2018).	Independen: -Jumlah Penduduk Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 3/ Tahun 2017 Hal. 3744-384.
6.	Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di	Independen: -Indeks Pembangunan Manusia Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: -Laju Pertumbuhan Ekonomi -Upah Minimum	Secara bersama-sama indeks pembangunan manusia berpengaruh dan secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat	Jurnal Vol 2, No.1, Tahun 2022, Hal: 196-202 ISSN:2828-2558.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Barat (Santi Fitria Andriani dan Westi Riani, 2022).			pengangguran terbuka.	
7.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, IPM, terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku (Addie Sabta Ibiyantoro dan Niniek Imaningsih 2022).	Independen: -IPM Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Angkatan Kerja	Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.11 No 3 November 2022 P-ISSN:2503-4413 E-ISSN:2654-5837, Hal 98-102.
8.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2014 (Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri, 2017).	Independen: -Jumlah Penduduk Dependen: -Pengangguran	Independen: -Upah Minimum -PDRB -Pendidikan	Berdasarkan hasil penelitian analisis variabel jumlah penduduk dan pendidikan menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur.	Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. Universitas Airlangga. Volume 2, No 1. Juni 2017: 02(1): 21-30 ISSN 2541-1470.
9.	Pengaruh IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten, 2011-2015	Independen: -IPM Dependen: -Tingkat Pengangguran		Ipm berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran.	Jurnal Vol. 9, No 1 April 2019. p-ISSN: 2089-4473.e-ISSN:2541-1314.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, 2019).				
10.	Pengangguran Terbuka dan Determinannya (Mohammad Rifki Muslim 2014)	Independen: -Pengeluaran Pemerintah  Dependen: -Tingkat Pengangguran	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Angkatan Kerja -Pendidikan	Hasil dari penelitian variabel pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY.	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014.
11.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PMDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (2000-2020), (Febby Ola Pandiangan, Jesika Pasaribu, et al. 2021).	Independen: -Jumlah Penduduk  Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: -Pertumbuhan ekonomi -PMDM -Inflasi	Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	E-Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) ISSN (online).
12.	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Kabupaten Toraja Utara (Viky Mouren, et al., 2022)	Independen: -Jumlah Penduduk  Dependen: - Pengangguran	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Pendidikan	Pada hasil penelitian ini tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran, sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 22 No. 5 Bulan Juli 2022.
13.	Analisis Faktor-Faktor yang	Independen: -Pengeluaran Pemerintah	Independen: -Upah -Investasi	Pengeluaran pemerintah berpengaruh	Jurnal Kajian Ekonomi, Juli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. (Zulhanafi, et al., 2013)	Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	- Inflasi -Pertumbuhan Ekonomi -Produktivitas	negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.	2013, Vol. 11, No.03
14.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera (Angga Syahputra, Erfit, et al 2019).	Independen: -Pengeluaran Pemerintah  Dependen: -Tingkat Pengangguran Terbuka	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -Upah Minimum -Tingkat Pendidikan	Secara parsial pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.8 No.2 Mei-Agustus (2019) ISSN: 2303-1255 (online).
15.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado tahun 2001-2017) (Rizaldi Kaharudin et.al 2019)	Independen: -Pengeluaran Pemerintah  Dependen: -Pengangguran	Dependen: -Pertumbuhan Ekonomi -Kemiskinan	Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 19, No.4. (2019)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel independen yaitu jumlah

penduduk, indeks pembangunan manusia, dan belanja publik pada Provinsi Jawa Tengah dan variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Tengah. Dari kerangka pemikiran tersebut, selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memudahkan kegiatan penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

### **2.2.1 Hubungan Jumlah penduduk dengan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hubungan antara jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya angkatan kerja. Namun peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat.

Menurut Hartanto, (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti jika tingkat jumlah penduduk naik maka tingkat pengangguran juga akan meningkat

### **2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Menurut Todaro dalam Mahroji & Nurkhasanah, (2019) teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia, tercermin dalam tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas manusia. Hal ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hubungan indeks

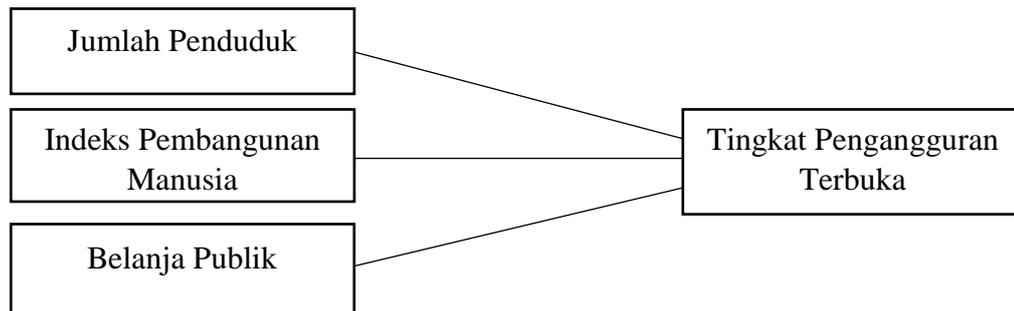
pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran yaitu pembangunan manusia merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut Todaro dalam (Mahroji & Nurkhasanah, 2019) pembangunan manusia merupakan tujuan untuk pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia berperan dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern yang digunakan untuk mengembangkan kapasitasnya agar menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Garnella et al., (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini berarti setiap peningkatan indeks pembangunan manusia dapat menyebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

### **2.2.3 Hubungan Belanja Publik dengan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Belanja publik yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang akan mendorong terciptanya kesempatan kerja. Pemerintah berupaya untuk menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan pekerjaan yang tersedia karena adanya aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Misalnya proyek pemerintah yang akan membutuhkan banyak tenaga kerja masyarakat.

Menurut Muslim, (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Belanja publik (pengeluaran pemerintah) digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang baru dan menekan tingkat pengangguran terbuka.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan yang bersifat sementara dan dianggap benar, agar dapat ditarik konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya, dapat menggunakan data-data hasil penelitian. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial diduga indeks pembangunan manusia, dan belanja publik berpengaruh negatif, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2002-2021.
2. Secara bersama-sama diduga jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan belanja publik berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2002-2021.